

MENALAR PARADOKS KONSEP NASIONALISME, GENERASI EMAS, DAN TEKNOKRASI: PERSPEKTIF ILMU SOSIAL KRITIS

Marianus Ola Kenoba

Pendidikan Sejarah Universitas Flores

marianuskenoba64@gmail.com

Abstract

Nationalism constitutes a fundamental concept within modern social sciences. However, its interpretation and system of meaning are not always neutral, often leading to paradoxes. This paradox arises from the notion that pragmatic nationalism is influencing the younger generation, which, by 2045, has been conceptualized within the sociopolitical framework as the "golden generation". This generation is inherently perceived as literate and adaptable to the dynamics of contemporary technological "logic." Nonetheless, the latent danger confronting the golden generation is the "ideology" of technocracy embedded in the application of modern technology. This research aims to internalize the concept of objective nationalism as a foundational basis for the golden generation, thereby mitigating the ideological biases present in technocratic systems. The study employs critical hermeneutics as a methodological approach to interpreting the written texts that serve as the primary references for this research. The findings indicate that critical education regarding objective nationalism is vital for strengthening the character of the younger generation, enabling them to confront the rationalizing threats posed by modern knowledge systems. Consequently, the concept of objective nationalism may function as a proactive instrument for the golden generation in addressing the ideological challenges posed by technocracy.

Keywords: Nationalism, Ideology, Golden Generation, Technocracy, Future Challenges

PENDAHULUAN

Nasionalisme menjadi konsep penting dalam pengalaman konkrit hidup berbangsa dan berbegara. Meskipun demikian, diperlukan pengambilan jarak yang obyektif atas konsep maupun penghayatan atas nasionalisme. Pengambilan jarak obyektif diperlukan agar tetap kritis dan obyektif terhadap realitas. Obyektivitas dan rasionalitas nilai berfaedah bagi generasi muda agar tidak terjebak ke dalam pemberhalaan terhadap konsep nasionalisme. Dari perspektif obyektif, nasionalisme yang seharusnya dianut adalah nasionalisme kritis tanpa pretensi khusus untuk menjadikannya sebagai ideologi pemberhalaan.

Pemahaman yang obyektif maupun bertendensi ideologis atas konsep nasionalisme ini, salah satunya dimotori oleh kekuatan teknologi informasi. Sementara itu, Filsuf Jaques Ellul memahami fakta rasionalisasi teknologis sebagai model ketergantungan manusia secara total terhadap teknologi. Eksistensi manusia dalam konteks ini generasi emas Indonesia bisa saja menjadi *second order* sebab cara berpikirnya akan diintervensi oleh rasionalitas teknologis. Dengan demikian, generasi emas Indonesia sungguh dihadapkan pada hambatan struktural dan kultural di tahun 2045 maupun pada era sesudahnya.

Tantangan utama di masa depan yang dihadapi yakni rasionalisasi dan standarisasi pada hampir semua bidang kehidupan (Hussien et al., 2021). Selanjutnya, bahaya laten yang dihadapi oleh generasi emas yakni ideologi teknokrasi. Premis dasar teknokrasi mengacu pada konsep perubahan pemaknaan dan praksis politis, baik di level individual maupun institusional (Drápalová & Wegrich, 2021).

Pada level kesadaran institusional, ditunjukkan secara nyata dalam bidang pertumbuhan kapitalisme moderen. Kapitalisme moderen mempersyaratkan laju pertumbuhan ekonomi, rasionalitas instrumental, diskursus kekuasaan politis, dan ideologis. Kekuasaan politis melahirkan tragedi ketidaksetaraan yang bermetamorfosa dalam slogan meritokrasi. Tercipta pula konflik manifes-menyembunyikan kuasa militerisme dan imperialisme. Sebaliknya, pada level kesadaran individual terjadi

hegemoni pembangunan dalam bentuk komodifikasi gaya hidup, rasionalisasi finansial, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam (Spash, 2021).

Rasionalisasi dan modernisasi menciptakan dinamika pertentangan klasik antara kebutuhan-kebutuhan teknokrasi untuk memperluas kuasa di satu sisi dan perjuangan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan universal di titik ekstrem lainnya. Desakan massif untuk memperjuangkan nilai-nilai etis kemanusiaan itu-lah yang menjadi hambatan utama yang dihadapi oleh sistem ideologi teknokrasi (Accetti, 2021).

Teknokrasi dapat didefinisikan sebagai upaya dominasi dan hegemoni oleh para politisi dan teknokrat dalam rangka mendorong kebijakan publik yang menguntungkan rezim (Tortola & Tarlea, 2021). Upaya dominasi melalui paksaan maupun normalisasi ini, juga memanfaatkan pendekatan ilmiah (*scientific*) untuk melakukan *social engineering* atau rekayasa terhadap kehidupan ber-sosial (Bertsou & Caramani, 2022).

Implikasi logisnya, generasi emas Indonesia bisa saja menjadi agen konsumtif sebab terkooptasi oleh kepentingan kapitalisme moderen. Ketidakberdayaan manusia dalam mengontrol logika teknologis, dapat ditafsirkan sebagai perwujudan terjadinya tragedi kemanusiaan. Tragedi humanisasi ini dapat terjadi karena manusia kehilangan eksistensi, esensi, dan daya kritisnya yang diakibatkan oleh hegemoni ideologi teknokrasi. Tragedi kemanusiaan perlu diantisipasi lebih dini oleh para *stakeholder*, mengingat generasi emas Indonesia di tahun 2045 adalah generasi yang sangat melek terhadap teknologi. Dan, teknologi memungkinkan lahirnya dilema "kecanduan" bagi generasi generasi emas Indonesia.

Penelitian ini penting sebab ketahanan identitas kebangsaan sangat ditentukan oleh penghayatan generasi muda terhadap rasa cinta tanah air (nasionalisme). Selain itu, generasi emas Indonesia perlu mengasah pengetahuan secara kritis, agar tidak terjebak ke dalam logika ideologi teknokrasi. Atas dasar itulah, riset tekstual ini bertujuan untuk mendorong kesadaran *golden generation* agar memiliki sensitivitas yang

tinggi atas identitas nasionalisme dan melek terhadap epistemologi pengetahuan dan teknologi modern.

METODE

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model riset hermeneutika kritis. Model riset hermeneutis kritis menjadi pertimbangan utama sebab seluruh data yang dimanfaatkan di dalam penelitian ini bersumber dari teks-teks tertulis. Teks tertulis yang dimaksudkan di sini berupa buku teks (*text book*) dan lebih-lebih paper jurnal ilmiah (*online*) yang bertautan dengan topik riset. Bertolak dari pokok pikiran di atas, maka pengumpulan data di dalam penelitian ini dengan cara memilih dan menelaah teks-teks literal. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan pembacaan secara kritis dan interpretatif atas seluruh teks yang telah dikumpulkan tersebut (Dwisusila et al., 2023). Sesudah seluruh teks tertulis itu dibaca secara kritis, kemudian dilakukan interpretasi kritis terhadap materi tekstual yang ada. Sementara itu, pada tahap interpretasi tekstual, peneliti mengandalkan kerja-kerja metodis hermeneutis (Bakker, 1986).

Secara historis maupun epistemologis, perkembangan filsafat hermeneutika selalu berada dalam intensi atau tegangan antara dua varian aliran pemikiran besar yang saling berposisi. Meskipun saling berposisi namun, kedua arus perdebatan itu sekaligus saling mengandaikan. Adapun dua kutub teoritis pada level epistemologis tersebut yakni aliran intensionalisme dan aliran hermeneutik Gadamerian.

Premis dasar yang dibangun oleh para penganut aliran pemikiran intensionalisme yakni makna sebuah teks sudah ada karena sudah dibawa oleh pengarang atau penyusun teks sehingga tinggal menunggu interpretasi dari penafsir (Bleicher, 2017). Sementara itu, hermeneutika Gadamerian bertolak dari premis dasar bahwa makna tekstual dicari, dikonstruksi, dan direkonstruksi oleh penafsir sesuai dengan konteks horizon penafsir (K.Bertens, 2002).

Makna tekstual tidak pernah bersifat final, ia senantiasa tergantung pada konteks penciptaan teks. Sementara itu, peristiwa pemahaman terjadi ketika adanya titik temu cakrawala tempat karya itu berada (Fransisco Budi Hardiman, 2015; Sumaryono, 1993). Dalam konteks historis, gagasan hermeneutika menempatkan sejarah itu sendiri sebagai medan dialog hidup antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan demikian, metode hermeneutik berupaya menyesuaikan setiap elemen dalam setiap teks menjadi satu keseluruhan yang lengkap, dalam sebuah proses yang lazimnya dikenal sebagai lingkaran hermeneutik (Fransisco Budi Hardiman, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sisi Paradoksal Konsep Nasionalisme

Filsafat sejarah merumuskan eksistensi manusia sebagai subyek otentik yang memiliki kesadaran historisitas. Kesadaran terhadap nilai-nilai historisitas inilah yang kemudian diradikalkan menjadi bagian dari hakikat eksistensial manusia. Menyadari hakikat eksistensial tersebut, maka setiap manusia dan bangsa memerlukan sejarah. Lebih dari itu, sebuah bangsa memerlukan sejarah untuk merumuskan identitas kolektivitasnya secara elegan, khas, sekaligus konstruktif. Identitas sebuah bangsa yang khas itu, salah satunya terwujud dalam konsep nasionalisme. Konsep nasionalisme dianut oleh warga-warga negara dalam kategori bangsa mana-pun. Manifestasi pemahaman atas nasionalisme; entah itu sempit maupun longgar, sebetulnya hanya menarasikan sebuah konjungtur sejarah yang senantiasa berkesinambungan (Antonsich, 2020).

Sebagai generasi baru Indonesia yang hadir sesudah tahun 1928, tentunya sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengalami secara langsung peristiwa-peristiwa bersejarah di sekitar tahun 1928. Meskipun demikian, konsep mengenai nasionalisme telah menjadi "*credo*" tersendiri yang diulang-ulang oleh pemegang *status quo*. Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda 1928 dan lebih-lebih kesadaran mengenai hakikat nasionalisme telah diterima secara *taken-for-granted* oleh semua anak

bangsa sehingga secara aklamasi telah mengaku sebagai anak-anak Ibu Pertiwi.

Akibatnya, nasionalisme sebagai sebuah konsep, hampir tidak pernah dipersoalkan secara terbuka. Nasionalisme di Indonesia diterima sebagai sebuah konsep yang seolah-olah netral dan bahkan mengalami purifikasi. Proses purifikasi tersebut terutama terjadi pada masa penguasaan Orde Baru. Fakta purifikasi atas konsep nasionalisme ini, paling nampak benderang dalam praksis kuasa rezim Orde Baru yang berkesinambungan selama hampir ±32 tahun. Selama rezim Orde Baru berkuasa, seluruh ilmu pengetahuan beserta keseluruhan apparatusnya, digiring untuk mengamankan *status quo* (Lieberman, 2021). Jadi, tidak mengherankan, hampir tidak ada ilmuwan sosial memiliki “nyali” yang cukup untuk sekedar mempersoalkan keberadaan konsep nasionalisme Indonesia.

Praktik politik kuasa yang tersentralisasi itu, kemudian melahirkan ironi politik baru. Cukup ironis memang, nasionalisme Indonesia merepresentasikan praktik sebuah “agama baru” yang dianut oleh kaum cendekiawan Indonesia pada awal abad sampai pertengahan abad duapuluh (Dhakidae, 2002). Dikatakan demikian karena konsep nasionalisme diparalelkan begitu saja dengan adagium “demi kepentingan bangsa dan negara”. Tidak berlebihan jika nasionalisme adalah senjata paling ampuh bagi rezim yang sedang berkuasa untuk melanggengkan *status Quo*.

Sementara itu mengutip pakar ilmu politik (Anderson, 2001), nasionalisme merupakan konsep yang tidak pernah netral dari tendensi kepentingan-kepentingan politis. Nasionalisme lahir dalam situasi politik dunia dan kehadiran maupun faedahnya bermuara pada kepentingan politis pula. Nasionalisme ala Perancis, Jerman, nasionalisme Asia-nasionalisme Indonesia adalah presentasi “korban” dari komunitas-komunitas terbayang atau *imagined communities*. Komunitas semacam itu, seolah-olah ada begitu dekat dengan dunia kita, namun serentak/sekaligus menciptakan gap tersendiri bagi seluruh anak bangsa.

Atas dasar itu-lah dapat dimengerti bahwa konsep tentang nasionalisme tidak pernah netral atas kepentingan nilai. Sebab, nasionalisme adalah perpanjangan dari proyek ideologis imperialisme yang keduanya selalu saling mengandaikan (Malešević, 2021).

Bertolak dari pengalaman Indonesia, cukup memberi bukti konkret bahwa demi nasionalisme, orang dapat dengan mudah-seolah-olah merasa begitu intim dengan orang lain dan atau etnis lainnya. Dan, anehnya seolah-olah muncul pula cita rasa senasib dan sepenanggungan. Namun di sisi lainnya, orang dapat pula dengan mudahnya melakukan kekerasan fisik, penyingkiran etnis tertentu dan propaganda politis lainnya hanya dengan bermodalkan slogan “atas nama nasionalisme”. Atas nama nasionalisme, orang bisa saja berkorban apa-pun termasuk megorbankan nyawanya sendiri. Dan itu-lah kira-kira tuah dari konsep nasionalisme dan serempak pula letak sisi paradoksal dari “ideologi” nasionalisme.

Sisi Paradoksal Konsep *Golden Generation*

Generasi manusia terbaik dalam sebuah bangsa mendapat predikat spesifik sebagai generasi emas (*golden generation*). Konsep generasi emas didasarkan pada cara pandang mengenai hadirnya tipe ideal manusia yang berada di dalam gambaran masyarakat yang ideal pula (Ismail et al., 2021). Mengacu pada pokok pikiran ini, maka diskursus intelektual berkenaan dengan konsep *golden generation* tengah menjadi *trending topic* kontekstual saat ini. Popularitas materi diskusi mengenai konsep *golden generation*, bukan saja menjadi materi analisis teoritis kaum cendekia-cerdik-pandai semata. Melainkan, publik yang paling awam-sekali-pun dapat mengakses sekaligus mendiskusikannya secara intens pula. Kemudahan akses informasi semacam ini, tidak terlepas dari berperannya teknologi komunikasi audio-visual virtual di abad milenial ini.

Sementara itu, prediksi ilmiah para pakar ilmuwan sosial menyatakan bahwa di tahun 2045, negara Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan sebagai salah satu negara otonom. Prediksi ilmiah dengan interval waktu yang dihitung secara rigit ini, menjadi moment

berharga yang paling dinantikan oleh seluruh lapisan warga negara Indonesia. Ilmuwan sosial memproyeksikan bahwa sistem ekonomi Indonesia akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2025. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, memungkinkan Indonesia akan menjadi negara industri yang patut diperhitungkan di dunia internasional pada tahun 2045 (Rokhman et al., 2014).

Sementara itu, generasi emas di abad ke-21 tepatnya di tahun 2045 adalah spirit zaman (abad ke-21) yang dapat diklasifikasi ke dalam tiga prasyarat kondisional yaitu literasi dasar, kompetensi, dan kualitas dalam konteks karakter. Sistem pengetahuan abad ke-21 akan mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi bagian dari kultur keseharian generasi emas di tahun 2045. Generasi emas adalah gambaran generasi unggul yang berpotensi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-21 (Yuningsih, 2019).

Penantian yang panjang atas sebuah *tempus* historis ini, didasari oleh asumsi dasar bahwa pada tahun 2045, negara Indonesia akan “mendulang emas” (Irfani et al., 2021). Emas dalam konteks ini adalah metafora bagi hadirnya generasi produktif dalam skala makro. Catatan usia produktif berskala besar tersebut, mengacu pada fakta usia penduduk saat ini yang masih berada di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) (Kementerian Ristekdikti, 2016).

Merujuk pada lengkungan kurva komposisi demografis, dapat dinyatakan bahwa pada kurun waktu 2015 hingga 2045, piramida penduduk Indonesia memperlihatkan komposisi yang sangat ideal. Dan, ciri yang paling menonjol adalah mayoritas penduduk berusia 25-45 tahun atau disebut usia produktif. Selanjutnya, tahun 2045 diperkirakan menjadi puncak produktivitas penduduk Indonesia. Bertolak dari prediksi ilmiah ini, dapat diungkapkan bahwa sejak tahun 2045, negara Indonesia memiliki surplus sumber daya manusia atau lebih populer dengan istilah bonus demografi (Irfani et al., 2021).

Meskipun demikian, surplus sumber daya manusia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu ditopang pula dengan piranti pendidikan formal. Generasi emas 2045 yang “dikepung” oleh beragam ideologi global sungguh memerlukan pijakan fondasi pendidikan yang kokoh. Pengembangan sektor pendidikan (formal-non-formal maupun informal) sesungguhnya terarah pada visi masa depan. Visi masa depan yang dimaksud di sini adalah menciptakan warga negara Indonesia yang berkualitas, inovatif, kreatif, berkarakter, serta memiliki responsibilitas yang tinggi terhadap nilai-nilai humanitas. Keberhasilan dalam mendesain dan mempraktikkan kurikulum pendidikan formal akan memberikan efek logis yang luas bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional secara holistik dan terintegrasi. Maksudnya, pengembangan pendidikan meliputi matra yang luas, lebih-lebih terhadap dimensi religiositas, etis, sosial, politik, budaya, maupun ekonomi (Irfani et al., 2021).

Betapapun demikian, bonus demografis bisa saja menjadi bumerang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Atas dasar itu-lah, dunia pendidikan semestinya menjadi oase bagi generasi emas. Pengelolaan pendidikan, memang bukanlah persoalan sederhana, karena jika “bibitnya” ditabur hari ini, maka manis “buahnya” baru bisa dirasakan 10 hingga 20 tahun mendatang. Jadi, butuh proses, *plus* kesabaran. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dan terutama pihak pengambil kebijakan perlu memiliki sikap konsistensi, responsibilitas etis, dan sinergi dalam menginisiasi lahirnya generasi emas Indonesia 2045 yang kritis dan produktif.

Pendidikan dengan standar mutu yang terukur senantiasa diperjuangkan oleh seluruh *stakeholder*. Dengan demikian, apparatus pendidikan formal seperti guru maupun dosen merupakan agen kunci. Guru dan Dosen dapat “mencetak” manusia muda Indonesia yang cerdas, inovatif, kreatif, religius, handal, produktif dan komprehensif melalui pelayanan pembelajaran yang bermutu. Melalui pelayanan pendidikan bermutu diharapkan terwujudnya generasi emas Indonesia yang berkualitas (Irfani et al., 2021).

Sisi Paradoksal Kultur Teknokrasi

Teknokrasi merupakan konsep sekaligus diskursus sosio-kultural yang serius untuk didialogkan dewasa ini. Teknokrasi adalah sebuah kultur yang dihasilkan dari dominasi rasionalitas ilmiah-teknologis terhadap peradaban manusia. Jadi, teknokrasi adalah sebuah ideologi manajemen saintifik yang memang dikalkulasikan probabilitasnya secara sangat rigid. Manajemen saintifik memungkinkan terjadinya rekayasa sosial (*social engineering*) secara sistemik sehingga budaya organisasinya selalu bervariasi yang digambarkan sebagai "teknostuktur". Pada level ideologis, sistem kepercayaan atas kekuatan rasionalitas instrumental didefinisikan sebagai "mentalitas teknokratis" (Yerramsetti, 2021).

Dari sisi historisitasnya, dapat digambarkan bahwa analisis kritis dan serius berkenaan dengan absurditas kultur teknokrasi dapat mengacu pada karya-karya akademis yang digarap oleh filsuf Jaques Ellul. Secara makro, Filsuf Jaques Ellul merumuskan konsep teknokrasi sebagai sebuah peradaban teknologi (Ellul, 2021). Tesis penting yang diajukan oleh Ellul bahwa teknologi mengkonstruksi sebuah pandangan dunia yang mencerahkan dan sekaligus secara eksplisit menampilkan ancaman serius bagi peradaban manusia. Pada level tak kasat mata, tengah terjadi proses hegemoni teknologi atas struktur kesadaran serta struktur tindakan manusia. Momentum dominasi dan hegemoni teknologi atas kesadaran manusia ini, oleh sejumlah filsuf postmodernisme diinterpretasikan sebagai gejala teknokrasi (Ulum & Pamungkas, 2020).

Ancaman serius yang diakibatkan oleh kultur teknokrasi berhubungan erat dengan sistem teknologi itu sendiri. Sistem teknologi yang termanifestasi di dalam otomatisasi, secara sangat sadar mengelaborasi premis-premis dasar filsafat pragmatisme. Misalnya, ide-ide tentang inovasi maupun pengembangan teknologi selalu direncanakan dengan kalkulasi matematis yang sangat ketat. Dan perencanaan yang

terkalkulasi itu, bukanlah hanya berada di awang-awang melainkan harus segera dipraktekan di dalam dunia kehidupan konkrit.

Jadi boleh dinyatakan bahwa pengetahuan maupun teknologi perlu dipaksakan untuk diinternalisasikan ke dalam kehidupan sosial, tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh nilai-nilai etis kemanusiaan. Tendensi pragmatis semacam ini diinternalisasikan di dalam prinsip sistem teknokrasi yakni segala *planning* tentang apa-pun harus segera dieksekusi sebab secara teknis dimungkinkan. Kultur teknokrasi dianut secara taat oleh para praktisi politik maupun para teknokrat untuk mengamankan status kekuasaan. Agar kekuasaan itu menjadi sah dan terlegitimasi, maka teknokrasi dapat menjadi sarana atau alat politis yang paling rasional untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengikat publik secara normatif (Hartley, 2021).

Dengan demikian, menjadi jelas-lah bahwa teknokrasi memiliki seperangkat mesin (aparatus politik) sebagai sarana sekaligus tujuan untuk mencapai keseimbangan politis. Sebaliknya, para teknokrat memiliki privilese khusus untuk menentukan dan mengefektifkan kebijakan yang dipandang strategis bagi keberlanjutan rezim yang sedang berkuasa (Sætra, 2020). Sebab, kuasa adalah sarana yang paling potensial untuk menguasai opini dan tindakan publik. Penguasaan terhadap “dunia pikiran” manusia adalah tujuan akhir dari ideologi teknokrasi. Sehingga tidak berlebihan jika hampir seluruh rezim penguasa di dunia ini berupaya mengadopsi bahkan secara legal-formal mengukuhkan keberadaan teknokrasi otokratis sebagai “agama” baru yang paling rasional (Windholz, 2020).

Pada tataran ini, dapat diterangkan bahwa pertimbangan teknis merupakan pilihan absolut dan final sehingga tidak perlu didiskusikan maupun diperdebatkan posisi epistemologisnya. Prinsip dasar sistem teknologisasi yang totaliter semacam ini benar-benar menutup kemungkinan bagi terbukanya ruang diskursus dialogis yang produktif. Tertutupnya ruang dialogis itu didasarkan pada sebuah *claim* klasik bahwa kebenaran (pembuktian) hanya dapat diverifikasi melalui hasil riil yang

diperlihatkan. Kemudian, orientasinya lebih diutamakan pada aspek kemanfaatan secara mekanis dengan skala prioritas yang dapat dikuantifikasi.

Cara pandang pragmatis seperti itu cukup riskan sebab orientasi utama pada tindakan praktis, bisa saja memunculkan apatisisme logis. Salah satu perwujudan sistem berpikir apatisisme dapat terungkap dari fakta terabaikannya nilai-nilai humanitas di dalam sistem teknologisasi. Pada tingkatan yang paling inheren, prinsip teknokrasi berkembang dalam jalinan logika pengetahuan yang absurd. Sebab, teknologi yang awalnya bersumber dari hasil rasionalitas manusia akan berjalan dengan sistemnya sendiri. Akibatnya, manusia hanya akan menjadi instrumen pelengkap dari sebuah sistem teknologisasi. Dan pada titik inilah, boleh dinyatakan bahwa rasionalisasi teknologi dan teknokrasi adalah peluang sekaligus tantangan ideologis paling serius bagi masa depan (Ryff & Singer, 2008).

Sementara itu, manusia sebagai kreator instrumen teknologi, akan mengalami ketergantungan struktural terhadap sistem teknologi. Ketergantungan manusia atas teknologi melahirkan problem psiko-sosial yang cukup mendasar. Kecemasan ini, terutama terarah kepada relasi kuasa teknologis yang mengakibatkan moment tercerabutnya manusia dari akar identitas psikologis, sosial, maupun kulturalnya (Wahyudi, 2016). Berdasarkan prinsip teknokrasi yang lebih memprioritaskan pada dimensi-dimensi teknis, maka manusia akan kehilangan otentisitasnya sebagai makhluk berpikir (*homo sapiens*).

Pemujaan berlebihan terhadap sarana-sarana instrumental teknologis akan mengarah ke fenomena yang disebut oleh sosiolog Max Weber dengan "pesona" rasionalitas instrumen. Menurut Weber, premis kunci dari rasionalitas tindakan yakni penggunaan perhitungan angka-angka pasti yang rasional disertai dengan seluruh apparatus pendukungnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ciri yang nampak dalam pengembangan rasionalitas tujuan adalah memprioritaskan pada metode kerja yang sangat baku (Funk, 2020).

Sementara itu, tindakan manusia semata-mata hanya berorientasi pada tujuan praksis yang hendak dituju. Sosiolog Weber merumuskan distingsi konseptual yang populer mengenai makna tindakan manusia di dalam pengalaman hidup bersosial. Konsep elementer yang dirumuskan oleh Weber yakni rasionalitas berorientasi nilai dan rasionalitas berorientasi sarana atau instrumen (Khalil & Marciano, 2021).

Konsep penting Weber mengenai rasionalitas dan efek-efek patologisnya, kemudian dikritik dan dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf Jurgen Habermas melalui pendekatan komunikatif. Rasionalitas komunikasi adalah model ideal pendekatan yang dapat menghindari kebuntuan epistemologis. Komunikasi dapat mendorong tercapainya jawaban yang benar untuk pertanyaan faktual. Sementara itu, rasionalitas nilai adalah hakikat atau dasar dari orientasi hidup manusia di dalam komunitas. Syarat prakondisional komunikasi yang ideal adalah dimilikinya pemahaman yang sama untuk sebuah dialog konseptual maupun praktis. Jadi, diperlukan sikap netral tanpa pretensi apa-pun dalam sebuah proses dialog atau komunikasi (Hammersley, 2022).

Habermas menafsirkan sistem rasionalisasi Weber dalam dua kategori yang disebutnya rasionalisasi dari "bawah" menyangkut unsur interaksi sosial dan rasionalitas "atas". Pengalaman hidup dalam kebersamaan dengan dialog tanpa prasangka ideologis apapun adalah gambaran masyarakat moderen yang ideal. Struktur sosial-budaya dan sistem nilai yang dihayati bersama adalah representasi model ganda masyarakat, di mana dua bidang yang terintegrasi oleh mekanisme yang saling bersinergi (Sik, 2019). Habermas ingin mengembalikan posisi teoritis yang telah diletakan Weber agar sistem pengetahuan tidak jatuh ke dalam motif ideologis tertentu.

Melalui pertimbangan rasionalitas komunikatif, kemungkinan ruang untuk dialog menjadi terbuka sehingga segala proyek teknologi yang menganut ideologi teknokrasi dapat dieliminasi melalui dialog atau diskusi tentang implikasi langsung penerapan teknologi dalam kehidupan masyarakat moderen. Jadi, tidak hanya mengacu pada kalkulasi untung-

rugi secara finansial semata melainkan efek teknokrasi terhadap penghancuran nilai-nilai kemanusiaan-pun menjadi agenda utama untuk didialogkan secara terus-menerus.

KESIMPULAN

Sistem pemaknaan yang rasional dan integral berkenaan dengan konsep nasionalisme akan berimplikasi positif dalam hal mengedukasi generasi emas. Sebagai referensi acuan dalam konteks pegangan nilai-nilai etis dan identitas kolektif, konsep nasionalisme *clear* dan obyektif memungkinkan terbentuknya karakter generasi muda (generasi emas) yang bermartabat. Karakter yang bermartabat ini menjadi simbolisasi resistensi terhadap eksekusi rasionalisasi ideologi kapitalisme lanjut dan proyek-proyek modernisasinya. Proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan yang kritis dan obyektif, disertai penguasaan *skill-skill* teknis, sudah menjadi keharusan historis yang tak terelakkan. Kemampuan integratif semacam ini memungkinkan terbentuknya karakter generasi emas Indonesia yang etis, responsif, tangguh, adaptif, dan cerdas dalam mengantisipasi kompleksitas perkembangan zaman. Jadi, pendekatan ilmu sosial kritis sangat relevan untuk menjawab tantangan masa depan dan berkontribusi positif bagi proses pembangunan nasional yang inklusif dan memiliki keberpihakan riil atas nilai-nilai kemanusiaan universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Accetti, C. I. (2021). Repoliticizing Environmentalism: Beyond Technocracy and Populism. *Critical Review*, 33(1), 47–73. <https://doi.org/10.1080/08913811.2021.1908023>
- Anderson, B. (2001). *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Inist.
- Antonsich, M. (2020). Everyday Nation in Times of Rising Nationalism. *Sociology*, 54(6), 1230–1237. <https://doi.org/10.1177/0038038520930178>
- Bakker, A. (1986). *Metode-Metode Filsafat*. Gahlia Indonesia.
- Bertsou, E., & Caramani, D. (2022). People Haven't Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies. *American Journal of Political Science*, 66(1), 5–23.

- <https://doi.org/10.1111/ajps.12554>
- Bleicher, J. (2017). *Contemporary hermeneutics: Hermeneutics as method, philosophy and critique*. Routledge. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eRlwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Contemporary+hermeneutics:+Hermeneutics+as+method,+philosophy+and+critique&ots=0GQPBUtzx8&sig=4CV2a9Q1ZdQ8n9t-h3xMUi-K9F8&redir_esc=y#v=onepage&q=Contemporary hermeneutics%3A Her](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eRlwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=Contemporary+hermeneutics:+Hermeneutics+as+method,+philosophy+and+critique&ots=0GQPBUtzx8&sig=4CV2a9Q1ZdQ8n9t-h3xMUi-K9F8&redir_esc=y#v=onepage&q=Contemporary+hermeneutics%3A+Her)
- Dhakidae, D. (2002). Pengantar: Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-Komunitas Terbayang. B. Anderson, *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Kerjasama Insist dan Pustaka Pelajar.
- Drápalová, E., & Wegrich, K. (2021). Technocratic populism and subnational governance. *Government and Opposition*, 56(4), 640–660. <https://doi.org/10.1017/gov.2020.16>
- Dwisusila, D., Zaim, M., & Thahar, H. E. (2023). Filsafat ilmu sebagai landasan penelitian sosial. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 214–220. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4782>
- Ellul, J. (2021). *The technological society*. Vintage.
- Fransisco Budi Hardiman. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius.
- Fransisco Budi Hardiman. (2015). *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*. Kanisius.
- Funk, J. K. (2020). Beyond instrumental rationality. For a critical theory of freedom. *Estudios de Filosofía*, 63. <https://doi.org/10.17533/udea.ef.n63a05>
- Hammersley, M. (2022). Max Weber and his conservative critics: Social science and the problem of value relativism. *Journal of Classical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/1468795X221096542>
- Hartley, K. (2021). Public Trust and Political Legitimacy in the Smart City: A Reckoning for Technocracy. *Science Technology and Human Values*, 46(6), 1286–1315. <https://doi.org/10.1177/0162243921992864>
- Hussien, H. M., Yasin, S. M., Udzir, N. I., Ninggal, M. I. H., & Salman, S. (2021). Blockchain technology in the healthcare industry: Trends and opportunities. *Journal of Industrial Information Integration*, 22(November 2020), 100217. <https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100217>
- Irfani, S., Riyanti, D., Muharam, R. S., & Suharno. (2021). Rand Design Generasi Emas 2045: Tantangan Dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kemajuan Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 123–134. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.532>
- Ismail, M. H., Long, A. S., & Yaakob, Z. (2021). Golden Generation' according Fethullah Gulen. *Jurnal International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 4(4), 181–196.
- K.Bertens. (2002). *Filsafat Barat Kontemporer: Inggris-Jerman*. Gramedia.
- Kementerian Ristekdikti, R. I. (2016). *Puspawarna Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, dan

Teknologi

- Khalil, E. L., & Marciano, A. (2021). A theory of instrumental and existential rational decisions: Smith, Weber, Mauss, Tönnies after Martin Buber. *Theory and Decision*, 90(1), 147–169. <https://doi.org/10.1007/s11238-020-09772-2>
- Lieberman, B. (2021). From Nationalism to National Indifference: Binary Logic and Sense of Time. *Nationalities Papers*, 49(5), 855–872. <https://doi.org/10.1017/nps.2020.53>
- Malešević, S. (2021). Forging the Nation-centric World: Imperial Rule and the Homogenisation of Discontent in Bosnia and Herzegovina (1878–1918). *Journal of Historical Sociology*, 34(4), 665–687. <https://doi.org/10.1002/johs.12350>
- Rokhman, F., Hum, M., Syaifudin, A., & Yuliati. (2014). Character Education for Golden Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 141, 1161–1165. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.197>
- Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. *Journal of Happiness Studies*, 9(1), 13–39. <https://doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0>
- Sætra, H. S. (2020). A shallow defence of a technocracy of artificial intelligence: Examining the political harms of algorithmic governance in the domain of government. *Technology in Society*, 62(May), 101283. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101283>
- Sik, D. (2019). Towards a social theory of fear: A phenomenology of negative integration. *European Journal of Social Theory* 1–20, XX(X), 1–20. <https://doi.org/10.1177/1368431019850074>
- Spash, C. L. (2021). Apologists for growth: passive revolutionaries in a passive revolution. *Globalizations*, 18(7), 1123–1148. <https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1824864>
- Sumaryono, E. (1993). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius.
- Tortola, P. D., & Tarlea, S. (2021). The power of expertise: gauging technocracy in EMU reform negotiations. *Journal of European Public Policy*, 28(12), 1950–1972. <https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1815824>
- Ulum, M. S., & Pamungkas, J. (2020). Analisis Kritis Terhadap metode Pembelajaran Berbasis Online Di Madrasah Ibtidaiyah Masa Pandemi Covid 19. *MUBTADI: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah*, 2(1), 17–35.
- Wahyudi, M. (2016). Konstruksi Integralitas Ilmu , Teknologi dan Kebudayaan. *Jurnal El-Banat*, 6(2), 235–249.
- Windholz, E. L. (2020). Governing in a pandemic: from parliamentary sovereignty to autocratic technocracy. *Theory and Practice of Legislation*, 93–113. <https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1796047>
- Yerramsetti, S. (2021). Not decided in the kitchen! Technocracy and the regulatory-welfare politics of India's Direct Benefits Transfer reform. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 908–924. <https://doi.org/10.1177/0020852319873708>

Yuningsih, Y. (2019). Pendidikan Kecakapan Abad Ke-21 Untuk Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*, 6(1), 135–152.
<https://doi.org/10.17509/jppd.v6i1.21526>